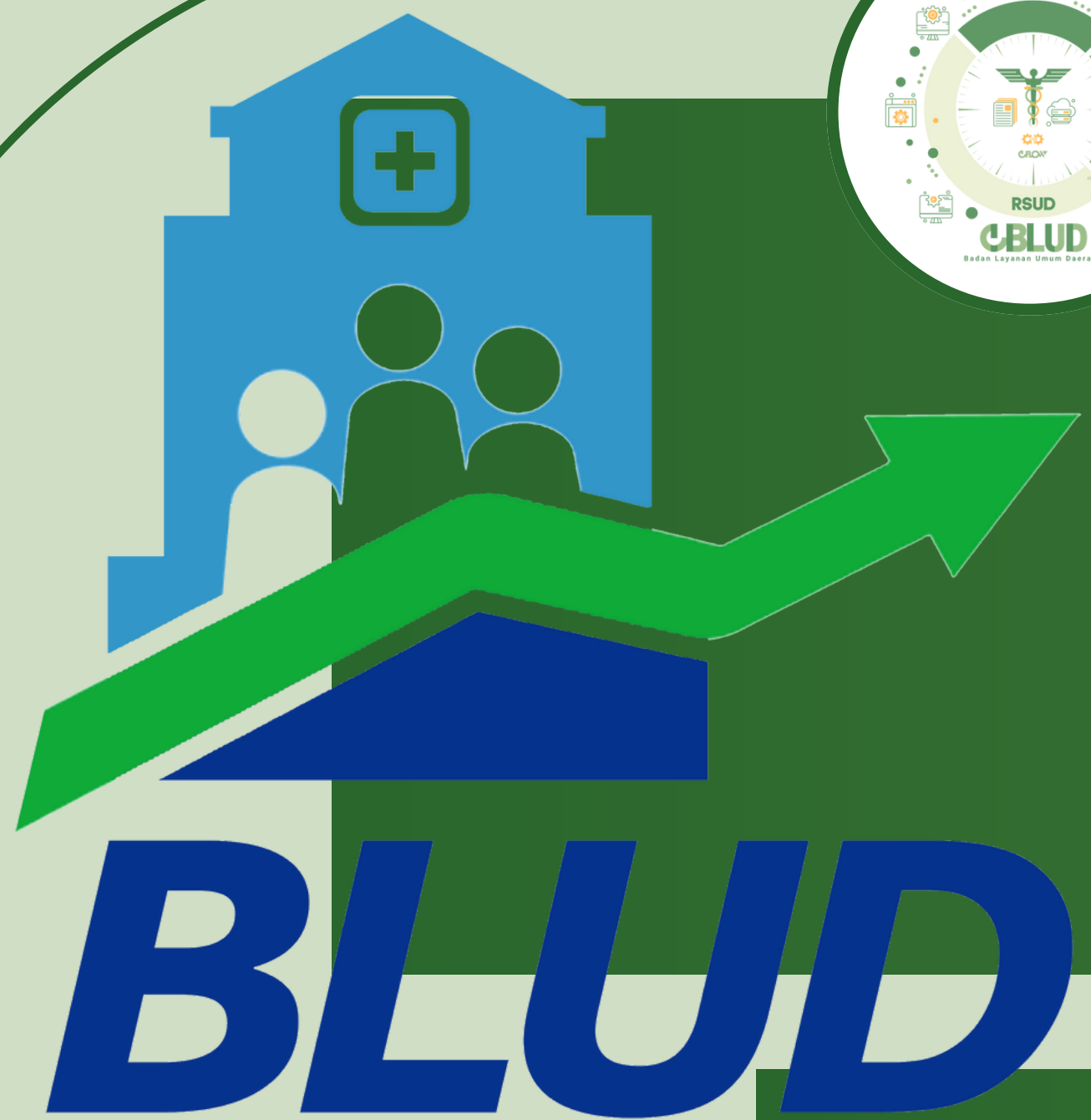


# ***FOCUS GROUP DISCUSSION PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD***

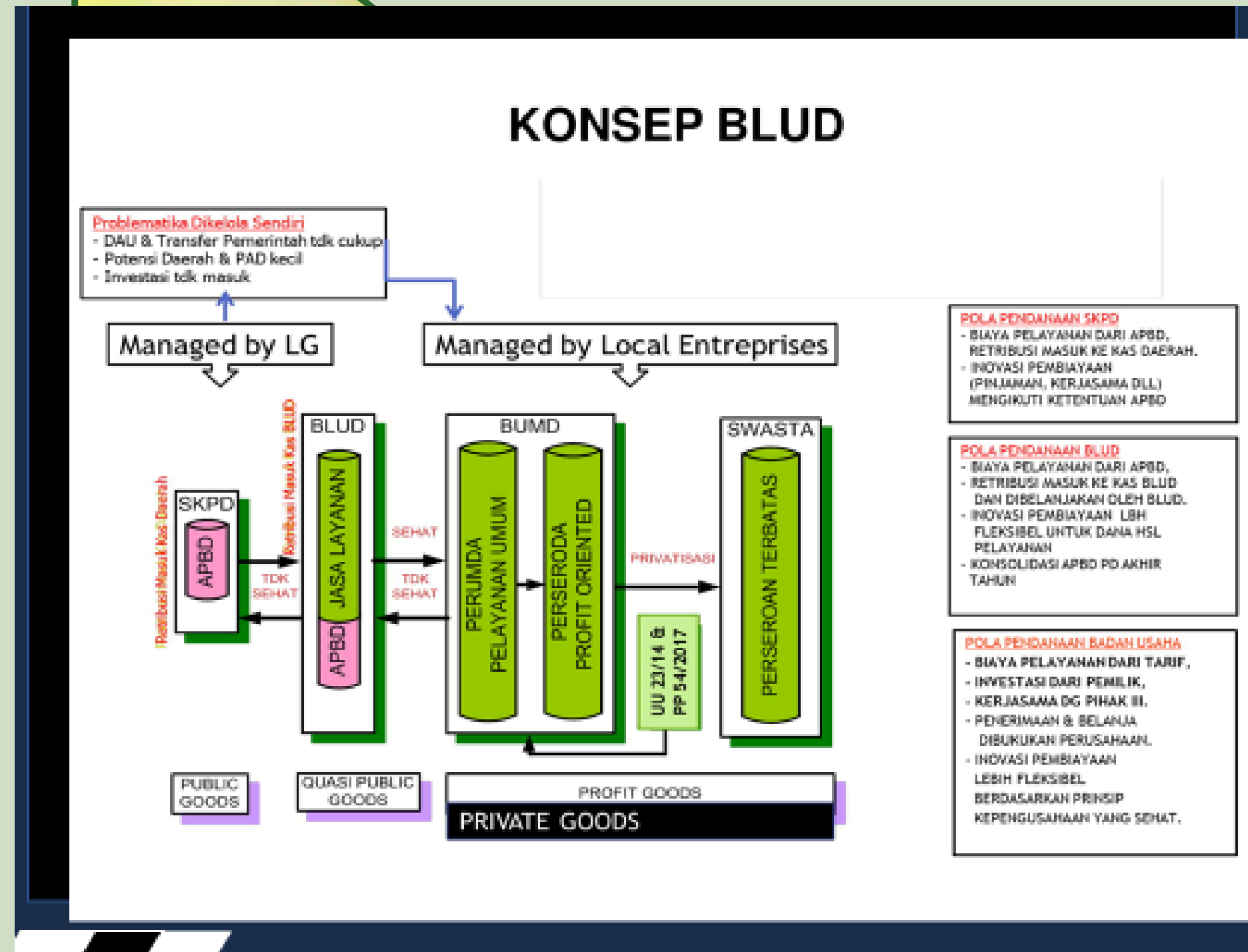


**.co.id**

✦ JUM'AT, 4 OKTOBER 2024 ✦



# PENTINGNYA MEMAHAMI KONSEP BLUD



- Penetapan tujuan BLUD menjadi **PENTING**, karena :
1. Layanan umum scr lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dgn memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dgn praktek bisnis yg sehat;
  2. Dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemda, dengan status hukum **TIDAK TERPISAH** dari Pemda;
  3. Dalam melaksanakan tujuan, BLUD diberikan **FLEKSIBILITAS** dalam pengelolaan keuangannya;
  4. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah;

# FLEKSIBILITAS BLUD

Untuk mencapai tujuan pendiriannya, BLU diberi fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.

Harus disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah



**PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA**



**KERJASAMA**



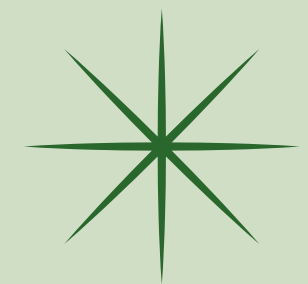
**PENGELOLAAN KEUANGAN**



**TARIF**



**SDM DAN REMUNERASI**



# PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BLUD



## Kebijakan Pemerintah Pusat

- khusus bidang Kesehatan, terkait kelembagaan dan Pola Tata Kelola RSUD sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sejalan dengan dikeluarkannya PP Nomor 72 Tahun 2019;
- layanan BLUD sebagai bagian dari Retribusi Daerah sehubungan dengan dikeluarkannya PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) sebagai Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah BLUD (SIPD/e-BLUD);
- penguatan Tusi Bagian Perekonomian Kab/Kota sebagai pembina BLUD.



# KEBIJAKAN PENGATURAN BLUD

Aktor pengelolaan keuangan [KPA dengan kewenangan setara PA, terdapat PPK Unit, Bendahara UOBK memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran]

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyeragaman Proses dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan



**RSD SEBAGAI UOBK**



**PENDAPATAN BLUD  
SEBAGAI RETRIBUSI  
DAERAH**



**IMPLEMENTASI  
SIPD/ E-BLUD**

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
2020

**PEDOMAN  
PENGELOLAAN  
KEUANGAN  
BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH**

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH  
DIREKTORAT BUMD, BLUD DAN BARANG MILIK DAERAH  
SUB DIREKTORAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

# PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Penegasan bahwa dalam rangka Peningkatan Pemahaman dan Penyeragaman Penerapan BLUD, maka Ditjen Bina Keuda Kemendagri Telah Menyusun Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;

Penegasan bahwa pedoman tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta akuntansi BLUD;

Pedoman tersebut merupakan Manual Book dari Aplikasi SIPD BLUD/E-BLUD sebagai system informasi Pengelolaan Keuangan BLUD dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah termasuk kebijakan akuntansi pada PSAP 13;

Penegasan kepada Pemda untuk mengimplementasikan pedoman tersebut dalam rangka penyusunan Rincian Bisnis Anggaran BLUD TA 2021 dan seterusnya, yang selanjutnya akan diikuti dengan proses pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan BLUD



# ARAH & KEBIJAKAN STRATEGI BLUD



- Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis Pengelolaan BLUD
- Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan BLUD

**MENINGKATKAN  
AKUNTABILITAS,  
TRANSPARANSI**



**TERTIB  
ADMINISTRASI  
PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH**



**MENINGKATNYA  
INVESTASI &  
KEMAMPUAN  
FISKAL DAERAH  
YANG KOMPETITIF**



# STRATEGI PEMBINAAN BLUD

- Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan BLUD yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia BLUD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan BLUD;
- Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan BLUD.





# HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN BLUD DAN PEMDA



**01 Penguatan Peran Pemda dalam pembinaan BLUD**

**02**  
Menyiapkan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka implementasi pengelolaan keuangan BLUD

**03 Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola, Pembina, dan Pengawas Keuangan BLUD**

**04**  
Mengalokasikan anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan keuangan BLUD

# KESIMPULAN PRESENTASI

- <https://bppkad.mageetan.go.id/klinik-akuntansi/> -

- BLUD dibentuk sebagai strategi [solusi] kebijakan perbaikan pelayanan publik, yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya dalam rangka meningkatkan pelayanan, produktivitas, efisiensi, dan efektifitas.
- Fleksibilitas yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah harus mampu memperkuat kelembagaan dan tata kelola BLUD dalam kerangka pencapaian tujuan, bukan sebaliknya.
- Arah kebijakan pembinaan BLUD harus mampu mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah [khususnya pengelolaan keuangan BLUD] yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatannya.





**TERIMA KASIH**

- <https://bppkad.magetan.go.id/klinik-akuntansi/> -

